

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Administrasi Pengarsipan di Surabaya

Rio Febriannur Rachman ¹

¹ Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; riofrachman21@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal
Administrative Science

Vol 4 No 1 Mei 2023 <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4i1.48>

Received: March 30, 2023
Accepted: April 28, 2023
Published: May 30, 2023

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Policies based on information and communication technology are unavoidable in the age of new media. One of the first governments to apply electronic and internet-based regulations was the Surabaya City Government. This article discusses the e-Archives initiative, a policy implemented by the Surabaya Library and Archives Service in 2017 and one of its policies. In an effort to administer archives policies within the Surabaya City Government, the implementation of the e-Archives policy is being described in this study. Technology determination and public policy analysis serve as the guiding theories. Additionally, a number of ideas, including Maqashid Syariah and sustainable development objectives, form the basis for discussion. The methodology utilized in this study is qualitative with a literature study approach, in which the literary sources serve as the main source of information. According to the study's findings, e-Archive policies adhere to the principles of information and communication technology use. E-Archives are a flexible way to carry out government directives. This initiative is in line with Maqasid Syariah Al-Ammah's tenets and the objectives of sustainable development, particularly given its ambition to build environmentally responsible cities and communities that can adapt to the difficulties of the modern world. This page is intended to contribute to the body of knowledge on technology-based public policy and how it aligns with Islamic ideals.

Keywords: Administration, Archives, Technology Determination, Maqasid Syariah, Sustainable Development Goals.

Pendahuluan

Di era media baru, masyarakat Indonesia semakin akrab dengan internet dan dunia digital (Rachman, 2017). Nyaris semua bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya serta hiburan sulit dilepaskan dari TIK.

Pemerintah daerah maupun pusat mesti memperhatikan fenomena ini, dengan mencetuskan kebijakan-kebijakan berbasis pemanfaatan teknologi mutakhir. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau media digital yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi tantangan di era media baru. Upaya mempererat kedekatan teknologi digital dengan masyarakat merupakan konsekuensi dari keberadaan masyarakat informasi. Semua lembaga pemerintah, termasuk kantor di tingkat pemerintah daerah atau kota, perlu berinovasi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan publik yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penduduk di wilayah tersebut sesuai dengan tantangan zaman (Anderson, 1984).

Surabaya merupakan salah satu kota di mana pemerintahnya adalah pioneer terhadap kebijakan berbasis elektronik. Ada banyak program inovasi di kota ini yang mengandalkan media digital. Dinas atau kantor yang terbukti telah melakukan terobosan di media digital antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Perhubungan (Rachman, 2021). Tentu saja, masih ada banyak dinas atau kantor Lain di Surabaya yang berkomitmen terhadap implementasi kebijakan berbasis teknologi. Dalam artikel ini, pembahasan hanya terbatas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sejak 2017, terdapat program inovasi di sana, yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi pengarsipan. Nama program inovasi ini adalah e-Arsip, pengelolaan arsip berbasis elektronik demi mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah para pengguna arsip itu sendiri. Arsip dibutuhkan oleh masyarakat luas, meskipun kebanyakan pengguna e-Arsip adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Surabaya. Namun pastinya, kebutuhan pengarsipan yang ada di tiap Perangkat Daerah, secara tidak langsung akan berbentuk pelayanan publik pada masyarakat luas (Setyawan, 2019).

Salah satu pemerintah daerah yang fokus dan berkelanjutan dalam memanfaatkan media digital untuk pelayanan publik adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pemkot Surabaya tercatat sebagai salah satu pelopor pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik. Sistem pelayanan publik melalui aplikasi elektronik berbasis internet di Surabaya dikembangkan sejak tahun 2003 saat diluncurkannya aplikasi e-Procurement untuk pengadaan barang dan jasa. Konsep pada inovasi tersebut direplikasi untuk kebijakan lain di Surabaya, maupun di luar kota Surabaya. Bahkan, di level nasional

pun substansi e-Procurement dijadikan percontohan. Selama ini perkembangan aplikasi dan media digital berbasis internet di Surabaya semakin bervariasi, antara lain Surabaya Single Window di bidang pelayanan perizinan, E-Health di bidang kesehatan, Peken di bidang marketplace produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan masih banyak program lain berbasis media digital (Sukarno & Shelsa, 2022).

Seluruh perangkat daerah berupaya menciptakan aplikasi pelayanan publik agar efisien dan efektif. Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima bagi warga Surabaya di segala bidang dan membangun komunikasi yang terintegrasi melalui media digital. Respons cepat Pemerintah Kota Surabaya terhadap pertumbuhan digitalisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang pada umumnya “terintegrasi” dengan internet. Apalagi kaum urban memiliki karakteristik yang peka terhadap perkembangan teknologi dan menjadikan dunia maya sebagai ruang interaksi dan ekspresi (Gere, 2008). Berdasarkan perspektif media dan komunikasi, kebijakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan implementasi program adaptif terhadap perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Sebagaimana diketahui, era media baru menggeser dan mendinamisasikan model komunikasi, karena pesan yang disampaikan atau ditanggapi dalam berbagai bentuk: berupa audio, visual, teks, dan sebagainya. Interaksi juga terjadi melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi (Holmes, 2005).

Studi ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana sumber-sumber kepustakaan menjadi data primer dalam tiap pembahasannya. Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan implementasi program e-Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. Teori yang digunakan adalah determinasi teknologi, sebagai landasan utama untuk membahas penggunaan media digital. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan teknologi adalah dua entitas yang saling mempengaruhi (McLuhan, 1962). Di satu sisi, teknologi berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, manusia bisa berkembang karena ditopang teknologi, yang mengarah pada kesimpulan bahwa teknologi mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi dalam masyarakat. Prinsipnya, hubungan yang terjalin antara teknologi dan masyarakat (Marx & Smith, 1994). Selain itu, teori dan konsep mengenai kebijakan publik saling melengkapi untuk menggambarkan bagaimana seharusnya pelayanan publik menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat (Dye, 1972).

Selain itu, disampaikan pula hubungan implementasi kebijakan publik e-Arsip dengan konsep Maqasid Syariah. Maqasid syariah adalah tujuan adanya hukum dalam masyarakat untuk melindungi lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kebijakan atau aturan publik yang berlaku di masyarakat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara maqasid syariah dengan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara. Seorang ulama Islam, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, membagi Maqasid Syariah menjadi dua, yaitu Maqasid Syariah al-'ammah dan Maqasid Syari'ah al-khāṣṣah (Ibnu Asyur, 1985). Maqasid Syari'ah al-'āmmah adalah tujuan syariat, hukum, peraturan, yang mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum. Sedangkan Maqasid Syari'ah al-khāṣṣah adalah tujuan khusus syariah, dalam lingkaran kecil kehidupan sehari-hari individu, yang mengkaji berbagai masalah, termasuk hukum keluarga, penggunaan harta individu, ibadah individu, dan masalah tertentu lainnya (Al-Jauziyah, 1969). Demi menjaga agar kajian ini tetap memiliki kebaruan dan bersifat holistik, studi ini juga melihat hubungan kebijakan e-Arsip dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Resolusi PBB tentang SDGs mengharapkan semua kebijakan publik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota selaras dengan minimal satu dari tujuh belas poin SDGs (United Nation, 2015b).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan bidang-bidang tertentu (Hasan, 2002). Masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah penduduk kota Surabaya, sedangkan wilayah yang diteliti adalah kebijakan publik penggunaan media digital yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Secara khusus, pengguna inovasi ini memang kebanyakan berasal dari internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Meski demikian, mereka menggunakan itu semua demi memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan media digital atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi e-Arsip memiliki spirit untuk memberikan

pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, yang memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data (Zed, 2008).

Sumber pustaka yang digunakan tidak akan lepas dari tema ini. Sumber tersebut berasal dari internal Pemkot Surabaya, maupun eksternal. Sumber lain yang dijadikan referensi adalah literatur yang berkaitan dengan teori determinasi teknologi, kebijakan publik, dan konsep Maqasid Syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan perumusan kesimpulan. Hasil analisis data dideskripsikan menurut kategorisasi yang sesuai untuk memperoleh gambaran faktual tentang topik yang sedang dibahas (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Teoritik

Kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang bersentuhan langsung dengan seluruh warga negara, dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Semua langkah pemerintah selalu memiliki konsekuensi atau memiliki korelasi dengan kehidupan warga negara. Di era saat ini, kebijakan publik dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, dapat pula berdasarkan hal-hal konvensional (Wahyuningsih & Rachman, 2021). Kebijakan publik tidak boleh stagnan atau kaku. Birokrasi harus terus dievaluasi agar memberikan manfaat yang maksimal. Sering kali sebuah kebijakan memiliki perbedaan ketika diterapkan di satu area dan diterapkan di area lain. Pasalnya, masing-masing daerah tersebut memiliki budaya, karakteristik, dan letak geografis yang berbeda. Jadi, interaksi masyarakat tidak sama. Oleh karena itu suatu kebijakan dari pemerintah harus dapat memperhatikan seluruh elemen masyarakat (Van Metter & Van Horn, 1975).

Ada beberapa tahapan dalam suatu kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kajian kebijakan publik setidaknya memiliki tiga tujuan (Parsons, 1996). Pertama, untuk kepentingan ilmiah guna menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan. Hal ini karena pemerintah merupakan pihak yang mengeksekusi suatu kebijakan. Kedua, untuk tujuan profesional atau strategis. Artinya, kajian kebijakan publik dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan solusi konkrit atas

permasalahan yang ada di satu tempat. Tentu saja, terdapat perbedaan permasalahan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, mempelajari kebijakan di satu tempat dapat menambah wawasan untuk merumuskan kebijakan di tempat lain. Oleh karena itu, ada istilah replikasi, copy study, atau adopsi suatu kebijakan. Ketiga, untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, alasan politik berkaitan dengan tahapan evaluasi eksekutif. Pemerintah daerah dituntut untuk mempelajari kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu sebagai proses evaluatif (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kebijakan publik dirumuskan oleh eksekutif. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Bisa jadi pemerintah memegang eksponen di masyarakat. Pengawasan suatu kebijakan dilakukan oleh legislatif atau dewan perwakilan rakyat setempat. Sedangkan evaluasi dilakukan bersama oleh eksekutif dan legislatif di meja dewan. Namun demikian, masyarakat juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dapat dilakukan antara lain melalui media massa, sedangkan evaluasi juga dapat menggunakan aspirasi legislator (Dunn, 2000).

Pada umumnya suatu kebijakan muncul karena adanya suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Untuk mencari solusinya, diperlukan gambaran yang komprehensif tentang masalah tersebut. Setelah itu, prediksi dibuat dari konsekuensi dari masalah yang dimaksud. Dampak negatif tersebut dapat diidentifikasi secara detail sehingga pada satu titik upaya penanggulangannya juga dapat dirumuskan dalam bentuk rekomendasi. Dari situ bisa dicetuskan kebijakan yang kemudian diimplementasikan. Pelaksanaannya harus dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan, dalam jangka waktu tertentu, untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang (Anderson, 1984).

Sejak tahun 2015, kebijakan publik di seluruh dunia diupayakan untuk diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang digariskan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada tujuh belas poin SDGs, di mana setiap kebijakan sesuai dengan setidaknya satu dari poin tersebut. Lebih baik lagi jika ternyata mampu mendukung lebih dari satu poin SDGs (United Nation, 2015a). Ketujuh belas SDGs yang dimaksud antara lain; No Poverty (menanggulangi kemiskinan), Zero Hunger (menghilangkan kelaparan), Good Health and Well-Being (hidup sehat dan baik), Quality Education (pendidikan

berkualitas), Gender Equality (mewujudkan kesetaraan gender), Clean Water and Sanitation (mewujudkan air bersih dan sanitasi), Affordable and Clean Energy (keterjangkauan energi bersih), Decent Work and Economic Growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), Industry, Innovation, and Infrastructure (pengembangan industri, inovasi dan infrastruktur). Poin lainnya adalah Reduced Inequalities (upaya mengurangi ketimpangan), Sustainable Cities and Communities (realisasi kota dan permukiman berkelanjutan).

Responsible Consumption and Production (konsumsi dan proses produksi yang bertanggung jawab), Climate Action (penanganan isu perubahan iklim), Life Below Water (kepedulian terhadap ekosistem perairan), Life on Land (kepedulian terhadap ekosistem darat), Peace, Justice, and Strong Institutions (perdamaian, keadilan, dan terciptanya institusi yang tangguh untuk menegakkannya) dan Partnership for the Goals (kemitraan atau kebersamaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang mulia). Dari tujuh belas poin tersebut, selanjutnya dibagi menjadi empat pilar (Kementerian PPN/Bappenas, 2020), antara lain pembangunan sosial (poin satu sampai lima), pembangunan ekonomi (poin tujuh sampai sepuluh dan tujuh belas), pembangunan lingkungan (poin enam, kesebelas, dan lima belas), pembangunan hukum dan pemerintahan (poin enam belas).

Kebijakan publik dapat dipelajari melalui konsep dan teori maqasid syariah yang populer di kalangan umat Islam. Maqasid syariah adalah tujuan adanya hukum dalam masyarakat untuk melindungi lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan (Al-Syathibi, 2003). Kebijakan atau aturan publik yang berlaku di masyarakat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara maqasid syariah dengan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara (Al-Zuhaili, 1986). Seorang sarjana Islam, Mu-hammad Thahir Ibnu Asyur, membagi maqâsid syari'ah menjadi dua, yaitu maqâsid syari'ah al-'ammah dan maqâsid syari'ah al-khâṣṣah (Al-Ghali, 1996). Maqâsid shari'ah al-'āmmah adalah tujuan syariat, hukum, peraturan, yang mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum.

Sedangkan maqâsid syari'ah al-khâṣṣah adalah tujuan khusus syariah, dalam lingkaran kecil kehidupan sehari-hari individu, yang mengkaji berbagai masalah, termasuk hukum keluarga, penggunaan harta individu, ibadah individu, dan masalah tertentu lainnya (Ibnu Asyur, 2001). Maqâsid syari'ah memiliki tujuan utama mencegah hal-hal yang merugikan manusia. Sebaliknya, masyarakat harus memperoleh manfaat, keadilan,

keutamaan, dan menegakkan kebenaran, dari adanya hukum yang berlaku di masyarakat (Ibnu Asyur, 1925). Ada beberapa kajian yang membahas kebijakan publik di Surabaya dalam konteks SDGs dan Maqasid Syariah, antara lain membahas kebijakan transportasi di bidang pemantauan dan pengaturan lalu lintas online. Ada juga pembahasan tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan pengembangan industri kreatif (Rachman, 2020).

Terdapat banyak penelitian yang menelaah tentang hubungan antara kebijakan publik di sebuah daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya, berjudul *Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window*. Riset ini memaparkan tentang salah satu kebijakan berbasis digital di Surabaya yang punya keselarasan dengan SDGs (Rachman, 2022). Riset lain yang mengupas persoalan pemberdayaan perempuan di Surabaya serta hubungannya dengan SDGs bertitel *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender* (Ginting & Sihura, 2020). Artikel tersebut mengetengahkan arti penting perempuan dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sementara itu, upaya menjalankan program berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan juga dilakukan secara simultan oleh banyak pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal itu dapat disimak melalui sebuah artikel berjudul *Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Pengembangan Apartemen Di Daerah Sleman Terhadap Kehidupan Masyarakat yang memaparkan strategi untuk mengatur pertumbuhan rumah susun di lokasi tersebut* (Harahap, 2020).

2. Seputar e-Arsip

E-Arsip merupakan aplikasi yang memfasilitasi segenap kebutuhan pengelolaan arsip di seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi leading sector terhadap pengelolaan kearsipan di lingkup Pemkot Surabaya. Bisa dibilang, dinas ini merupakan koordinator pengarsipan di Surabaya, di mana pengelolaan e-Arsip di seluruh tubuh Pemkot Surabaya pun dimotori dan digerakkan oleh instansi ini. E-Arsip merupakan salah satu inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Surabaya sejak 2017 (Kaffah, 2019). Kebijakan ini dilandasi sejumlah regulasi, di antaranya; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tata Kearsipan Dan Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya No. 045/504/436.7.17/2022 Tentang Aplikasi e-Arsip.

Inovasi ini memiliki sejumlah manfaat, di antaranya, memfasilitasi klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dan memfasilitasi jadwal retensi arsip otomatis untuk kebutuhan penyusutan arsip, di mana e-Arsip juga sudah memiliki Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta) No. 000153222 sebagai Program Komputer oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan kata lain, kebermanfaatannya sudah bisa dipertanggungjawabkan (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).

Dampak positif dari inovasi ini juga bisa dilihat dari perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah adanya e-Arsip. Sebelum e-Arsip diimplementasikan, masing-masing Perangkat Daerah belum memiliki daftar arsip dinamis. Sementara itu, pengelolaan arsip statis oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga masih manual. Selain itu, arsip digital hasil alih media belum terfasilitasi secara rapi. Pembinaan maupun pengawasan kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih dilakukan secara offline, sehingga kurang efektif dan efisien. Tak hanya itu, layanan permohonan data atau pencarian arsip membutuhkan waktu lama, sekitar tujuh hari kerja. Pasalnya, ada banyak tahap yang masih dilakukan secara manual. Setelah adanya e-Arsip, pengelolaan arsip dinamis sudah berjalan dengan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara online atau melalui sistem.

Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi lebih hemat tenaga, waktu, dan biaya. Arsip-arsip statis serta hasil alih media bisa dikerjakan dengan lebih cepat dengan penataan yang jauh lebih tertib administrasi. Layanan permohonan data atau pencarian arsip bisa ditangani dengan lebih cepat atau sehari kerja, karena arsip-arsip telah terdigitalisasi. Mesin pencari atau search engine kearsipan di seluruh lingkungan Pemkot Surabaya telah terintegrasi. Fitur e-Arsip bisa menunjukkan informasi hasil pencarian dalam hitungan detik.

Pengawasan terhadap kinerja pengarsipan yang holistik dari Wali Kota pun dapat dijalankan secara realtime (Musaddad, Niswah, Prasetyo, & Hardjati, 2020).

Inovasi e-Arsip memiliki sejumlah capaian yang dapat dilihat secara kuantitatif antara lain, dalam rentang 2019 hingga 2022, tak kurang dari ada 161.370 berkas arsip digital dinamis yang dikelola. Sementara di rentang 2017 hingga 2022, terdapat 74.763 berkas arsip digital statis yang dirapikan secara administrasi. Tak hanya itu, ada 138.418 berkas arsip yang sudah dialih media, sehingga arsip-arsip yang dimaksud telah memiliki data back up digital. Jumlah tersebut merupakan capaian di kurun 2019 hingga 2022. Pembinaan dan monitoring bisa dilakukan secara rutin, masing-masing perangkat daerah yang berjumlah enam puluh tiga, bisa ditinjau tiap bulan sekali. Secara total, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan tinjauan hingga 756 kali per tahun. Pada rentang 2018 hingga 2022, pelayanan terhadap permintaan data/pencarian arsip yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak kurang dari 559 permohonan yang ditangani (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).

Hingga saat ini, sudah banyak instansi yang melakukan studi tiru atau kunjungan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, antara lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, DPRD Kabupaten Magelang, DPRD Kabupaten Grobogan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kutai Kertanegara, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok, Universitas Negeri Semarang, dan lain sebagainya (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022).

Implementasi inovasi ini tidak bisa dilepaskan dari peran perangkat daerah lain di lingkup Pemkot Surabaya. Dengan kata lain, sinergitas menjadi faktor penentu berlangsungnya program ini. Gagasan adanya model kearsipan terintegrasi datang dari Wali Kota Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pelaksana inovasi adalah seluruh jajaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan domain dan pengelola server maupun jaringan internet difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kebijakan e-Arsip merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bila merujuk pada teori determinasi teknologi, implementasi kebijakan ini merupakan fenomena manusia yang ingin beradaptasi

dengan perkembangan zaman yang ada. Di lain pihak, manusia memang membutuhkan aplikasi e-Arsip untuk mempermudah urusannya. Hubungan yang saling berjaln kelindan inilah yang menjadi refleksi adanya determinasi teknologi di sekitar manusia pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini (Abdullah, 2019).

Di era new media seperti saat ini sudah banyak kebijakan publik yang sesuai dengan modernitas teknologi, misalnya Dinas Pariwisata Jawa Barat sedang mengembangkan promosi melalui Instagram (Sumara, Saepudin, & Dwi Aksa, 2019). Ada pula Arsip Nasional Republik Indonesia yang dalam pengelolaan kehumasan berkonsentrasi pada optimalisasi media digital (Kharisma & Agustina, 2019). Intinya, instansi pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia berlomba-lomba mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Bahkan, pemanfaatan media digital di tingkat desa juga terjadi secara terus menerus (Oktiani & Gunawibawa, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintah antara lain oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah (Saifuddin, 2020). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat (Jaeger, Bertot, & Shilton, 2012).

3. Kebijakan Berkelanjutan

Ada banyak definisi konsep atau teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Pada prinsipnya kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berdampak pada masyarakat (Anderson, 1984). Semua kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan warga negara. Kegiatan pelaksana semua kebijakan merupakan struktur dalam pemerintahan. Ada tiga tingkat hirarki dalam implementasi kebijakan, yaitu tingkat kebijakan, tingkat organisasi, dan tingkat operasional (Bromley, 1989). Dalam negara demokrasi, level kebijakan umumnya dimainkan oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Sedangkan level organisasi dimainkan oleh para eksekutif. Ada pula level operasional yang diperankan oleh lembaga pelaksana, pihak swasta, atau elemen masyarakat yang terkait langsung dengan kebijakan. Suatu kebijakan selalu memiliki pengaturan atau pengaturan kelembagaan. Di Indonesia bisa berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan sebagainya.

Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-Arsip yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya merupakan kebijakan publik yang sesuai dengan tantangan terkini. Dalam konteks ini pemegang kebijakan dalam kebijakan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pengesahan DPRD Kota Surabaya, atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan yang tercantum dalam anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan level organisasi diperankan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana, dan level operasional dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya yang terdiri dari petugas jajarannya. Peraturan daerah tentang APBD, peraturan walikota terkait pengarsipan, serta peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, merupakan pengaturan kelembagaan atas kebijakan tersebut terkait e-Arsip.

Ada tiga tahapan dalam kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi (Tachjan, 2006). Tahap perumusan biasanya dilakukan oleh eksekutif, bisa juga melibatkan legislatif. Karena anggaran kegiatan terkait dengan APBD maka perumusan dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan DPRD Surabaya. Perumusan ini menyebabkan terciptanya peraturan yang mengikat. Tahap implementasi kebijakan publik dilakukan oleh eksekutif. Peraturan atau aturan mengenai kebijakan menjadi pedoman yang harus diikuti dalam proses implementasi (Grindle, 2004). Pada tahap ini suatu kebijakan dapat memberikan dampak bagi masyarakat, baik negatif maupun positif. Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa implementasi merupakan tahapan penentuan kebijakan, dari mana tahapan atau evaluasi selanjutnya dapat dilakukan (Ripley & Franklin, 1987). Salah satu cara yang paling efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan adalah dengan menganalisis secara objektif kondisi masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan. Hal yang ingin dilihat adalah mengenai kemanfaatan, mengingat apakah kebijakan yang diterapkan harus berdampak positif dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat (Dunn, 2000). Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, ada banyak dampak positif dari kebijakan ini. Di sisi lain, kebijakan ini juga terus menerus dievaluasi. Evaluasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Evaluasi kebijakan juga dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya. Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan juga terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD, warga, dan pihak manapun.

Dalam konsep Maqasid Syariah terdapat lima unsur pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa/nyawa, akal/pikiran, harta, dan keturunan (Al-Syathibi, 2003). Ibnu Asyur membagi konsep itu menjadi dua, yang intinya ada unsur-unsur yang sifatnya dalam lingkup publik atau umum, ada pula yang lingkungannya di ranah privat atau khusus lingkungan kecil seperti keluarga (Ibnu Asyur, 2001). Kebijakan e-Arsip merupakan implementasi menuju perlindungan terhadap aspek-aspek penting di ranah publik. Tentu saja, ada kebermanfaatan umum yang bisa dirasakan dari program inovasi ini. Ketertiban dalam administrasi pengarsipan pasti punya dampak positif pula pada program-program lain di lingkup Pemkot Surabaya.

Bila ditelusuri, kebijakan e-Arsip punya keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya di poin Sustainable Cities and Communities, Life on Land, dan Partnership for the Goals. E-Arsip merupakan bukti kesungguhan Pemkot Surabaya untuk bisa mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Cara yang dilakukan adalah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan tantangan zaman. Di era kekinian, inovasi di bidang digitalisasi dan pengembangan teknologi sudah tidak mungkin terelakkan. Dengan adanya e-Arsip, kebijakan di bidang kearsipan lebih ramah lingkungan. Pasalnya, kebijakan ini mereduksi penggunaan kertas serta memiliki spirit untuk menjaga lingkungan di daratan. Ada pun di aspek kemitraan, seperti dipaparkan di bagian sebelumnya, terdapat sinergitas antar instansi di internal Pemkot Surabaya demi menjalankan program inovasi ini. Di sisi lain, ada upaya berbagi informasi atau wawasan melalui studi tiru. Terbukti sudah banyak pihak yang telah melakukan kunjungan maupun studi banding ke Surabaya untuk belajar mengenai e-Arsip.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui program e-Arsip yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya merupakan bentuk pelayanan publik yang sejalan dengan fenomena determinasi teknologi. Inovasi ini tidak hanya menjadikan administrasi pengarsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, proses pendampingan dan monitoring terhadap pengelolaan arsip di level perangkat daerah

menjadi lebih mudah bagi Donas Perpustakaan dan Kearsipan selaku koordinator arsip daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga sejalan dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang digariskan oleh PBB. Ada banyak poin SDGs yang sejalan dengan semangat kebijakan ini, di antaranya pada poin Sustainable Cities and Communities, Life on Land, dan Partnership for the Goals. Inovasi e-Arsip bisa direplikasi di daerah lain karena relatif mudah ditiru serta sesuai dengan kondisi zaman media baru seperti sekarang ini. Kebijakan publik ini juga sejalan dengan Maqasid Syariah karena dapat dimasukkan dalam kategori upaya memberikan kebermanfaatan bagi publik secara meluas. Meskipun, dampak yang diterima masyarakat tidak secara langsung sebagaimana halnya bantuan sosial, eksistensi e-Arsip bisa membantu perangkat daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui program masing-masing.

Referensi

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, F. (2019). Fenomena digital era revolusi industri 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, 4(1), 47–58.
- Al-Ghali, B. (1996). *Syaikh al-Jamī' al-A'zam Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr; Ḥayātuh wa Āṣāruh*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Jauziyah, I. A.-Q. (1969). *I'lām al-Muwaqqi'in*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis.
- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muawāfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Damaskus: Dar al-Fikri.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). Peserta SJPP Kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Retrieved March 20, 2023, from www.anri.go.id website: <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/peserta-sjpp-kunjungi-dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-kota-surabaya>
- Bagian Organisasi Pemkot Surabaya. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik 2023*. Surabaya: Bagian Organisasi Pemkot Surabaya.
- Bromley, D. W. (1989). *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gere, C. (2008). *Digital Culture*. London: Reaktion Books.
- Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan*

Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar, 3(2), 201–213.

- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform In Developing Countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Harahap, P. P. (2020). Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Pengembangan Apartemen Di Daerah Sleman Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(2), 135–146.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Holmes, D. (2005). *Communication Theory: Media, Technology and Society*. New York: Sage Publications Ltd.
- Ibnu Asyur, M. T. (1925). *Naqd Al-'Ilmi Li Kitab Al- Islam Wa Usul Al-Hukmi*. Cairo: Al-Salafiyah.
- Ibnu Asyur, M. T. (1985). *Usul Al-Nizam Al-Islamy Fi Al-Mujtama'*. Tunisia: Syirkah Al-Tunisiyah Li Al-Tauzi.
- Ibnu Asyur, M. T. (2001). *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Jaeger, P. T., Bertot, J. C., & Shilton, K. (2012). Information Policy and Social Media: Framing Government—Citizen Web 2.0 Interactions. In C. G. Reddick & S. K. Aikins (Eds.), *Web 2.0 Technologies and Democratic Governance* (pp. 11–25). New York: Springer-Verlag.
- Kaffah, U. Z. (2019). *Usability evaluation dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen kearsipan (e-Arsip) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Metadata Indikator.
- Kharisma, T., & Agustina, L. (2019). Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 112–119.
- Marx, L., & Smith, M. R. (1994). *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- McLuhan, M. (1962). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographical Man*. Toronto: University of Toronto Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publishing Inc.
- Musaddad, A. A., Niswah, M., Prasetyo, K., & Hardjati, S. (2020). Implementasi Manajemen Kearsipan Di Sektor Publik. *Jurnal Governansi*, 6(2), 133–143.
- Oktiani, H., & Gunawibawa, E. Y. (2019). Tata Kelola Website Desa Dan Kapasitas Pengelola Dalam Memproduksi Konten Sebagai Media Informasi Dan Promosi Potensi Desa (Studi Pada Pengelolaan Dan Kompetensi Pengelola Website Desa Di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). *LONTAR*, 7(2), 1–10.
- Parsons, W. (1996). *Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Rachman, R. F. (2017). Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 206–222.
- Rachman, R. F. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 125–143.
- Rachman, R. F. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Dinas Perhubungan Surabaya dalam Perspektif Kearsipan Digital. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 2(1), 1–18.
- Rachman, R. F. (2022). Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 6(2), 1428–1441. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v6i2.161>

- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1987). *Congress, The Bureaucracy, and Public Policy*. Chicago: Dorsey Press.
- Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(2), 183–192.
- Setyawan, Y. A. (2019). *Analisis Pengamanan Informasi Pada Manajemen Sistem Informasi Kearsipan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya*. Universitas Brawijaya.
- Sukarno, M., & Shelsa, A. G. P. (2022). Optimalisasi Layanan Publik Berbasis E-Govqual Model Pada Website Surabaya Single Window. *Seminar Nasional Dan Call for Papers "Collaborative Governance and Digital Transformation to The Smart Cities."* Ciamis: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh.
- Sumara, A., Saepudin, S., & Dwi Aksa, Y. (2019). Nilai Konsumen Wisata Dalam Ruang Promosi Digital. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 129–143.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- United Nation. (2015a). About the Sustainable Development Goals.
- United Nation. (2015b). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.
- Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyuningsih, M. E., & Rachman, R. F. (2021). Penyebaran Konten Lokal di Grup Facebook Penggemar Perpustakaan Lumajang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(3), 1190–1209.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.